

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara geografis terletak pada wilayah *ring of fire* yang menyebabkan tingginya risiko bencana alam, namun manajemen mitigasi di tingkat desa sering kali masih bersifat reaktif daripada preventif. Masalah utama yang muncul adalah seringnya keterlambatan penanganan darurat karena kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan elemen masyarakat lokal. Terdapat *gap* yang lebar antara regulasi nasional mengenai penanggulangan bencana dengan implementasi kapasitas masyarakat di wilayah terpencil. Secara teoritis, manajemen bencana yang efektif memerlukan pendekatan *Total Disaster Management* yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu kesatuan aksi. Observasi awal di Kecamatan Ngrayun menunjukkan bahwa kerentanan geografis belum sepenuhnya diimbangi dengan struktur organisasi kesiapsiagaan yang permanen di tingkat desa. (Ansell & Gash 2017) Faktor inilah yang menuntut adanya sinergitas yang lebih terencana antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan komunitas setempat agar risiko dampak bencana dapat ditekan secara signifikan. (BNPB. 2020).

Desa Baosan Lor memiliki karakteristik topografi perbukitan curam yang sangat rentan terhadap bencana tanah longsor, terutama saat intensitas curah hujan tinggi, namun kesadaran warga dalam menjaga tata guna lahan masih rendah. Masalah mendasar di wilayah ini adalah pola pemukiman warga yang berada di zona merah rawan longsor tanpa adanya sistem peringatan dini yang memadai. Kesenjangan terlihat dari adanya bantuan logistik yang sering kali menumpuk di satu titik tanpa distribusi yang merata saat terjadi bencana skala kecil. Teori partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein menekankan bahwa masyarakat harus berada pada level *citizen power* untuk benar-benar mampu mengelola risikonya sendiri. Data lapangan mencatat bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, frekuensi kejadian longsor di Ngrayun meningkat, namun keterlibatan warga masih sebatas membantu setelah kejadian berlangsung.

Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) sebagai wadah formal kemitraan pemerintah dan rakyat. (Adiyoso, W. 2018).

Hubungan antara BPBD dan masyarakat sering kali terkendala oleh hambatan komunikasi birokrasi yang kaku sehingga informasi peringatan dini tidak sampai tepat waktu ke tangan penduduk. Masalah ini diperparah dengan keterbatasan personel BPBD Kabupaten Ponorogo yang harus mengaver wilayah luas dengan medan yang sulit seperti di Desa Baosan Lor. Terjadi *gap* fungsional di mana BPBD dianggap sebagai satu-satunya penanggung jawab, sementara masyarakat cenderung memposisikan diri hanya sebagai objek penerima bantuan. Landasan teori kelembagaan menunjukkan bahwa sinergi dapat tercapai apabila terdapat kesamaan persepsi dan pembagian peran yang jelas antar aktor. (Pramono, R. 2021). Di lapangan, ditemukan bahwa relawan desa sering kali bingung mengenai rantai komando saat terjadi situasi darurat karena belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) lokal yang disepakati. Hal ini menjadi penghambat utama dalam mewujudkan ketangguhan desa yang berkelanjutan.

Program DESTANA yang digagas oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memberikan otonomi bagi desa dalam mitigasi, namun pada kenyataannya, pembentukan DESTANA di banyak wilayah hanya bersifat administratif tanpa kegiatan rutin. Masalahnya adalah ketiadaan anggaran khusus di tingkat desa untuk memelihara sarana mitigasi bencana yang telah diberikan oleh BPBD. Terdapat kesenjangan antara kebijakan "Desa Tangguh" dengan alokasi dana desa yang lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur fisik non-bencana. Teori tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) mengamanatkan adanya kolaborasi yang inklusif untuk menjamin keamanan publik. (Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2014). Data di Desa Baosan Lor menunjukkan bahwa struktur pengurus DESTANA sudah dibentuk, namun program simulasi bencana jarang dilaksanakan secara periodik. Tanpa adanya aktivitas yang konsisten, konsep kemitraan yang diharapkan antara pemerintah dan warga akan tetap menjadi dokumen di atas kertas saja.

Partisipasi masyarakat di Desa Baosan Lor sebenarnya memiliki potensi besar melalui budaya gotong royong, tetapi potensi ini belum terorganisir dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang sistematis. Masalahnya adalah kearifan lokal dalam membaca tanda-tanda alam mulai ditinggalkan oleh generasi muda, sementara teknologi modern belum sepenuhnya diadopsi. *Gap* pengetahuan ini menyebabkan masyarakat sering kali tidak siap menghadapi bencana yang datang secara tiba-tiba di malam hari. Teori aksi kolektif menjelaskan bahwa individu akan bergerak jika mereka merasa memiliki kepentingan yang sama terhadap keamanan lingkungannya. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa warga sebenarnya bersedia terlibat, namun mereka membutuhkan pelatihan teknis yang lebih intensif dari pihak BPBD. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana BPBD dapat menjembatani kebutuhan teknis tersebut dengan semangat partisipasi lokal warga Ngrayun. (Sugiyono. (2019).

Hambatan spesifik di Kecamatan Ngrayun mencakup kendala geografis berupa medan perbukitan curam yang sering menyebabkan putus akses komunikasi dan transportasi saat terjadi longsor. Selain itu, terdapat faktor budaya di mana literasi bencana masyarakat masih rendah; alarm peringatan dini seringkali tidak diinterpretasikan sebagai instruksi evakuasi, melainkan dianggap sebagai bagian dari fenomena alam biasa. Masalah teknis yang dihadapi Desa Baosan Lor adalah kendala sinyal komunikasi yang tidak stabil di area perbukitan Ngrayun, sehingga menyulitkan pelaporan cepat ke BPBD. Terdapat *gap* teknologi di mana aplikasi pelaporan bencana berbasis digital belum bisa diakses secara maksimal oleh warga pelosok. Teori difusi inovasi menjelaskan bahwa adopsi teknologi di pedesaan seringkali terhambat oleh infrastruktur dan keterampilan teknis pengguna. (Suryani, E. 2023). Data lapangan menunjukkan bahwa warga lebih mengandalkan grup WhatsApp, namun saat listrik padam akibat longsor, komunikasi terputus total. Jurnal teknologi informasi menekankan perlunya sistem komunikasi radio komunitas sebagai cadangan di wilayah rawan bencana. (Hidayat, T. 2024). Indikatornya

adalah ketersediaan alat komunikasi alternatif dan kecepatan penyampaian informasi dari desa ke kabupaten.

Masalah utama pasca peresmian Desa Tangguh Bencana adalah hilangnya semangat pengurus dan warga setelah kegiatan seremoni berakhir. *Gap* keberlanjutan terlihat dari banyaknya papan informasi bencana yang mulai pudar dan tidak terbaca, serta jalur evakuasi yang tertutup semak belukar. Teori *Sustainability Development* menekankan bahwa setiap program pembangunan harus memiliki mekanisme pemeliharaan jangka panjang agar manfaatnya terus terasa.(UNDP. 2019). Observasi lapangan di Ngrayun menunjukkan bahwa struktur organisasi DESTANA seringkali hanya aktif saat ada kunjungan dari instansi pemerintah pusat atau daerah saja. Jurnal manajemen publik menyarankan adanya sistem insentif non-finansial bagi relawan desa untuk menjaga motivasi mereka.(Saputra, D. (2024). Indikatornya adalah adanya kegiatan rutin pengecekan jalur evakuasi dan pembaruan peta risiko desa.

1. Penelitian terdahulu

Dalam penulisan tugas akhir, peneliti mengacu pada jurnal yang merujuk pada penelitian sebelumnya untuk mencari persamaan, perbedaan dan menemukan hal baru antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya, kita dapat melihat perbedaan ide yang digunakan dan mempertimbangkan secara matang pembahasan dalam tugas akhir, Penelitian terdahulu juga membantu peneliti untuk mengembangkan pembahasan yang ada serta memberikan referensi untuk mengembangkan supaya penelitian ini bisa diterima di kalangan luas penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh **Nur Aini (2017)** mengenai efektivitas program DESTANA di Desa Sirnobojo, Pacitan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program pencegahan bencana di lokasi tersebut belum berjalan efektif karena kendala keterbatasan anggaran daerah serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran relawan. Penelitian Aini memberikan landasan penting bagi peneliti untuk melihat bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia dan finansial yang kuat,

sebuah program ketangguhan desa akan sulit mencapai tujuannya. Perbedaan mendasar terletak pada fokusnya; jika Aini menekankan pada aspek efektivitas, penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada aspek **strategi dan sinergitas kolaboratif** di lokasi yang memiliki karakteristik geografis berbeda, yakni perbukitan curam di Desa Baosan Lor.

Kedua, studi oleh **Elysa Putri dan Satriyo Wibowo** yang mengevaluasi implementasi DESTANA di Desa Dadirejo sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi banjir. Temuan mereka menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi di tingkat lokal sangat bergantung pada pembentukan lembaga dewan pengurangan risiko dan pembangunan infrastruktur evakuasi yang konkret. Kaitan dengan penelitian ini adalah pada pentingnya pengorganisasian masyarakat sebagai subjek utama dalam mitigasi. Namun, penelitian saat ini memiliki keunikan karena menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk membedah tantangan komunikasi di wilayah dengan kendala sinyal dan akses transportasi yang sulit di Kecamatan Ngrayun, yang berbeda dengan konteks bencana banjir di dataran rendah.

Ketiga, penelitian dari **BPBD Provinsi Jawa Tengah** di Desa Bungasrejo yang menyoroti faktor internal dan eksternal dalam keberhasilan pelatihan DESTANA. Penelitian tersebut menekankan bahwa kehadiran koordinator yang mumpuni serta dukungan kuat dari pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan program. Temuan ini sangat relevan untuk mendukung analisis peneliti mengenai bagaimana peran BPBD Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pendampingan teknis di Baosan Lor. Pembaruan yang ditawarkan dalam skripsi ini adalah analisis mendalam mengenai **keberlanjutan (sustainability)** pasca-pembentukan DESTANA, guna menjawab fenomena penurunan semangat pengurus yang sering terjadi setelah seremoni peresmian berakhir.

Melalui sintesis ketiga penelitian di atas, peneliti memposisikan skripsi ini sebagai upaya untuk merumuskan model kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat Ngrayun ke dalam struktur formal manajemen bencana daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hubungan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo dengan Masyarakat Desa dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan collaborative governance dan partisipasi masyarakat pada program DESTANA di Desa Baosan Lor?
3. Bagaimana partisipasi Masyarakat Desa Baosan Lor dalam mewujudkan program Desatana tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas antara BPBD Kabupaten Ponorogo dan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Desa Baosan Lor.
2. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Desa Baosan Lor.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses kolaborasi antara instansi pemerintah dan elemen masyarakat di Desa Baosan Lor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan tata kelola bencana (*disaster governance*) dan teori kolaborasi antar aktor.

- b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik mengenai efektivitas program Desa Tangguh Bencana dan partisipasi publik di wilayah rawan bencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- b. Bagi BPBD Kabupaten Ponorogo: Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun strategi pendampingan serta penguatan kapasitas masyarakat desa di wilayah lereng pegunungan seperti Ngrayun.
- c. Bagi Pemerintah Desa Baosan Lor: Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan anggaran (APBDes) dan pengorganisasian relawan desa agar lebih sistematis dalam menghadapi ancaman bencana.
- d. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam mitigasi bencana demi mewujudkan kemandirian dan ketangguhan komunitas.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara efektif oleh satu pihak saja. Dalam konteks Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA), collaborative governance diwujudkan melalui kerja sama antara BPBD Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Baosan Lor, organisasi masyarakat, dan warga desa dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan,

serta penanggulangan bencana secara partisipatif dan berkelanjutan. (Ansell & Gash, 2008).

2. BPBD

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) BPBD merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan penanggulangan bencana, namun seringkali terkendala keterbatasan personel untuk menjangkau wilayah pelosok. Dalam konteks ini, BPBD berperan sebagai penyedia pelatihan teknis bagi relawan desa guna meningkatkan literasi bencana masyarakat. (BPBD Prov Jateng, 2024)

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial, memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan, serta berinteraksi secara berkelanjutan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku (Koentjaraningrat, 2009).

4. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Desa adalah suatu kesatuan dalam kebudayaan atau yang disebut dengan desa adat yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah terbatas yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. DESTANA

Desa Tangguh Bencana adalah Desa yang mempunyai kemampuan memahami jenis-jenis ancaman di wilayahnya dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis ancaman di wilayahnya, serta dapat mengelola sumber daya yang ada di masyarakat untuk menguranginya. kerentanan dan pengembangan kapasitas dan keterampilan untuk mengurangi risiko bencana. Kemampuan masyarakat diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang

meliputi, kegiatan pencegahan, partisipasi, pengurangan, kesiagaan serta peningkatan kapasitas pemulihan pascabencana. (Najib & Rahmat, 2021).

F. Landasan Teori

1. Teori Collaborative Governance

teori Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif. Dalam konteks penanggulangan bencana di Desa Baosan Lor, aktor kunci terdiri dari BPBD Kabupaten Ponorogo sebagai representasi pemerintah daerah, Pemerintah Desa Baosan Lor, serta unsur masyarakat atau relawan DESTANA.

Menurut Ansell & Gash, (Ansell & Gash 2017) terdapat empat variabel kunci untuk melihat keberhasilan sebuah kolaborasi yang dapat diaplikasikan dalam penelitian ini:

- a. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*): Kolaborasi harus didasarkan pada komunikasi langsung untuk memecahkan hambatan birokrasi dan membangun pemahaman bersama. Di Baosan Lor, hal ini krusial mengingat adanya kendala geografis dan sinyal yang sering menghambat pelaporan bencana.
- b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*): Sinergitas hanya akan tercipta jika ada kepercayaan antar aktor. BPBD harus memposisikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek penerima bantuan.
- c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*): Keberlanjutan program DESTANA sangat bergantung pada komitmen jangka panjang, bukan hanya sebatas seremoni peresmian.
- d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*): Setiap aktor harus memiliki persepsi yang sama mengenai risiko bencana di Ngrayun dan memahami pembagian peran masing-masing melalui SOP yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.

Penerapan *Collaborative Governance* dalam mitigasi bencana bertujuan untuk mencapai *Total Disaster Management* dengan menyatukan seluruh sumber daya (anggaran, personel, dan kearifan lokal) untuk menekan risiko dampak bencana secara signifikan.

2. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan, termasuk dalam mitigasi bencana. Dalam konteks kebencanaan, masyarakat bukan lagi sekadar objek yang menerima bantuan, melainkan subjek utama yang memiliki pengetahuan lokal terkait ancaman di wilayahnya. Partisipasi ini menjadi kunci keberhasilan karena masyarakat adalah pihak pertama yang berhadapan langsung dengan bencana. (Ife, J., & Tesoriero, 2006). Secara teoretis, partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari sekadar pemberian informasi hingga kemitraan penuh dan pengendalian oleh warga. Partisipasi yang diharapkan dalam pembentukan Destana adalah partisipasi substantif, di mana warga secara sukarela menyumbangkan tenaga, pikiran, dan materi untuk kepentingan bersama. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan risiko yang mereka hadapi sehari-hari. (Putnam, R. D., *Bowling Alone*, 2020).

Faktor pendorong partisipasi meliputi faktor internal seperti pendidikan dan tingkat ekonomi, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah dan ketersediaan sarana. Masyarakat yang memiliki ikatan sosial kuat (social capital) cenderung lebih mudah digerakkan dalam kegiatan kerja bakti atau pelatihan simulasi bencana. Modal sosial ini menjadi fondasi bagi terciptanya gerakan mitigasi berbasis komunitas yang berkelanjutan. (Putnam, R. D., *Bowling Alone*, 2020). Tantangan utama dalam membangun partisipasi adalah mengatasi sikap apatis yang sering muncul akibat minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal. Jika masyarakat merasa program tersebut adalah "proyek atasan", maka partisipasi mereka akan bersifat semu atau sekadar menggugurkan

kewajiban. Oleh karena itu, pendekatan *bottom-up* sangat krusial dalam menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program Destana. (Ife, J., & Tesoriero, 2006).

Pelatihan dan pemberdayaan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi. Dengan pengetahuan yang cukup mengenai cara evakuasi dan pertolongan pertama, partisipasi masyarakat menjadi lebih efektif dan terukur. Ilmu pengetahuan modern tentang bencana harus disinergikan dengan kearifan lokal (local wisdom) agar lebih mudah diterima oleh warga desa. (Adiyoso, W, 2018). Partisipasi juga mencakup keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Mitigasi bencana yang inklusif memastikan bahwa suara semua lapisan masyarakat didengar dalam penyusunan peta risiko desa. Keadilan dalam partisipasi ini menjamin bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal saat situasi darurat terjadi. (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012) Pada akhirnya, partisipasi masyarakat yang kuat akan menciptakan kemandirian dalam menghadapi bencana. Kemandirian ini penting mengingat bantuan dari pemerintah seringkali memerlukan waktu untuk mencapai lokasi terdampak. Dengan adanya partisipasi yang terorganisir melalui kelompok relawan, maka dampak kerugian akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin. (Coppola, D. P, 2006).

3. Kerangka Program Desa Tangguh Bencana (Destana)

Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah program yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan mandiri dalam mengenali ancaman, melakukan mitigasi, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Program ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh BNPB, yang menekankan pada penguatan kapasitas di tingkat akar rumput. Destana berfungsi sebagai wadah untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan desa. (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012) Komponen utama dalam Destana meliputi adanya regulasi desa tentang kebencanaan, forum risiko bencana desa, serta dokumen rencana penanggulangan bencana. Dokumen-dokumen ini

menjadi panduan operasional bagi warga dan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya lokal untuk kesiapsiagaan. Keberadaan Destana juga memastikan adanya alokasi Dana Desa yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat preventif. (Wahyuningrum, dkk *Jurnal Ilmu Sosial*, 2019.)

Indikator keberhasilan Destana dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memahami peta rawan bencana di wilayahnya masing-masing. Peta ini disusun secara partisipatif untuk mengidentifikasi area yang paling berisiko serta jalur evakuasi yang paling aman. Dengan visualisasi yang jelas, warga dapat mengambil tindakan cepat tanpa menunggu instruksi yang berbelit-belit saat tanda bahaya muncul. (BNPB, 2012). Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) berbasis komunitas juga menjadi bagian integral dari program ini. Penggunaan alat sederhana seperti kentongan atau pengeras suara masjid yang dikelola secara sistematis merupakan bentuk aplikasi nyata dari konsep Destana. Teknologi tepat guna ini seringkali lebih efektif dan terpelihara dibandingkan alat canggih yang mahal namun sulit dirawat oleh warga desa. (Mileti, D. S., *Disasters*, 2016).

Penguatan kapasitas ekonomi masyarakat juga masuk dalam agenda Destana. Masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik karena mereka memiliki tabungan atau aset untuk memulihkan diri pascabencana. Oleh karena itu, program ini seringkali dikaitkan dengan pengembangan mata pencaharian yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem yang berfungsi sebagai pelindung alami dari bencana. (Wisner, B., dkk, 2024). Evaluasi tingkat ketangguhan desa dilakukan melalui penilaian berkala yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Desa yang tangguh harus memiliki akses air bersih yang tetap terjaga saat bencana dan bangunan publik yang tahan gempa atau banjir. Standar-standar teknis ini menjadi tolok ukur kemajuan sebuah desa dalam bertransformasi menjadi Destana. (Kartasasmita, G, 2016). Secara filosofis, Destana adalah upaya mengubah paradigma dari yang semula bersifat responsif-darurat menjadi preventif-pengurangan risiko. Perubahan

mentalitas ini membutuhkan waktu dan edukasi yang berkelanjutan. Destana bukan sekadar label, melainkan budaya baru yang mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan hidup di wilayah rawan bencana. (Jakarta: Direktorat PRB BNPB, 2016).

4. Manajemen Bencana dan Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK)

Manajemen bencana merupakan proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tindakan untuk menghadapi peristiwa bencana. Siklus ini terdiri dari tahap pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat tanggap darurat, dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Pengelolaan yang baik menuntut integrasi antara kebijakan makro dengan tindakan mikro di lapangan. (Carter, W. N., 2008). Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) menjadi pendekatan yang paling relevan dalam manajemen bencana di tingkat desa. Konsep ini menekankan bahwa komunitas lokal adalah pelaku utama dalam manajemen risiko, karena mereka yang paling mengetahui karakteristik lingkungan tempat tinggalnya. PRBBK mengalihkan fokus dari intervensi eksternal menjadi pemberdayaan kapasitas internal yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. (Shaw, R., 2021).

Identifikasi ancaman merupakan langkah awal yang krusial dalam PRBBK. Ancaman seperti tanah longsor atau banjir di wilayah pedesaan seringkali memiliki pola yang dapat diprediksi melalui pengamatan alam. Pengetahuan tradisional ini, jika dipadukan dengan data ilmiah dari BPBD, akan menghasilkan analisis risiko yang sangat akurat untuk kepentingan mitigasi sektoral. (Twigg, J, 2015). Langkah selanjutnya adalah penilaian kerentanan, baik kerentanan fisik, sosial, maupun ekonomi. Kerentanan fisik mencakup kualitas bangunan dan lokasi pemukiman, sedangkan kerentanan sosial menyangkut kepadatan penduduk dan struktur demografis. Dengan memahami titik-titik lemah tersebut, intervensi dapat diarahkan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan di desa tersebut.

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai simulasi dan penyuluhan secara rutin. Kapasitas bukan hanya soal peralatan fisik, tetapi juga mentalitas dan keterampilan teknis dalam menangani situasi krisis. Masyarakat yang terlatih akan mampu bertindak tenang dan sistematis, sehingga meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa yang diakibatkan oleh kepanikan massal. Manajemen bencana juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sebagai bentuk mitigasi jangka panjang. Kerusakan hutan atau penyempitan daerah aliran sungai sering menjadi pemicu bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, PRBBK seringkali melibatkan aksi penanaman pohon atau pembersihan saluran air sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Secara menyeluruh, manajemen bencana yang efektif adalah manajemen yang inklusif dan kolaboratif. Integrasi antara pengetahuan saintifik, kebijakan pemerintah, dan kearifan lokal masyarakat desa menciptakan perisai yang kuat terhadap ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang mengedepankan perlindungan warga negara di manapun mereka berada. (Permendagri no 46 tahun 2016)]

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah gambaran variabel-variabel teori. Definisi operasional merupakan penjelasan suatu konsep atau variabel sehingga dapat dinilai dengan memperhatikan indikator-indikator dari konsep atau variabel tersebut.

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan :

1. Desa berperan sebagai pemebuat kebijakan serta produk hukum berupa PERDES dan surat keputusan , pembentukan relawan pengurangan resiko bencana (PRB) serta pengorganisirn masyarakat dalam kebencanaan, Pendanaan Destana melauli Anggaran Dana Desa
2. Kelembagaan Desatana Desa Baosan Lor yakni pembentukan forum penanggulangan resiko bencana dan satgas penanggulangan bencana.
3. Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat Desa Baosan Lor. dalam menyongsong keberhasilan Progam Desa Tangguh Bencana

masyarakat harus aktif dalam penanggulangan kebencanaan, masyarakat berperan sebagai aktor yang penting dalam upaya pengurangan resiko bencana di Desa Baosan Lor

4. Pelaksanaan Sosialisasi publikasi dan edukasi yang dilakukan setiap tahun dalam rangka meningkatkan Sumber daya manusia pemerintah Desa berkerjasama dengan melibatkan pemerintah Desa ,reawan dan masyarakat

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell pendekatan kualitatif menitik beratkan pada problematika orang dan antar sesama. Hasil pengamatan data deskriptif yaitu mengamati manusia secara tertulis dan perkataan. lebih lanjut dalam (Hanyfah et al., 2022) Penelitian kualitatif dan teknik deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan metode pengolahan data dengan menilai aspek-aspek yang berkaitan dengan item penelitian dan memberikan fakta secara rinci tentang objek penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menurut (Rompas, 2017) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan memperoleh informasi dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. (Sugiyono, 2023), Pertimbangan tersebut didasarkan pada kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai collaborative governance antara BPBD Kabupaten Ponorogo dan masyarakat dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Penggunaan teknik purposive sampling dalam penelitian kualitatif bertujuan agar peneliti memperoleh data yang kaya (*information rich cases*), sehingga informasi yang diperoleh benar-benar berasal dari pihak yang memahami fenomena yang sedang diteliti.(John W. Creswell & Cheryl N, 2018). Oleh karena itu, penentuan informan tidak dilakukan

secara acak, melainkan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. (Sugiyono, 2023).

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: Pertama pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo atau pejabat yang menangani bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Kedua Pemerintah Desa Baosan Lor yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Program DESTANA. Ketiga pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) atau relawan DESTANA. Keempat Satgas Penanggulangan Bencana serta kelima masyarakat Desa Baosan Lor yang aktif mengikuti kegiatan mitigasi maupun penanggulangan bencana dan memahami kondisi kebencanaan di wilayah tersebut. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena mereka dinilai memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana. Informasi yang diperoleh dari masing-masing informan diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bentuk kolaborasi, tingkat partisipasi masyarakat, faktor pendukung, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Program DESTANA di Desa Baosan Lor.

Teknik purposive sampling juga telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu mengenai kebencanaan dan tata kelola kolaboratif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini (2017) mengenai efektivitas Program DESTANA menggunakan informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam program sehingga mampu menghasilkan data yang mendalam mengenai implementasi kebijakan di tingkat desa. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Elysa Putri (2021) dalam penelitian mengenai implementasi Desa Tangguh Bencana, di mana informan dipilih berdasarkan pengalaman dan perannya dalam penyelenggaraan mitigasi bencana. Dengan demikian, penggunaan teknik

purposive sampling dalam penelitian ini dinilai tepat karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan kedalaman informasi daripada jumlah responden.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk penelitian guna untuk mendapatkan informasi dan data. Dalam menentukan lokasi penelitian, penelitian melakukan penelitian di Desa Baosan Lor Kec Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik meneliti Desa tangguh bencana di Desa Baosan Lor karena Program Desatana di Baosan Lor merupakan program yang sangat cocok ditingkatkan terutama di daerah pegunungan seperti desa baosan lor ini juga merupakan suatu tingkatan tertinggi dalam program desa tangguh bencana. Desa Baosan Lor juga memiliki relawan serka partisipasi masyarakat dalam kebencanaan yang aktif dan terstruktur .

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah BPBD bagian pencegahan dan kesiapsiagaan, staff pemerintah Desa Baosan Lor, Penanggung jawab Destana Desa Baosan Lor, Satgas Penanggulangan Bencana Desa Baosan Lor dan Masyarakat Desa Baosan Lor yang berpartisipasi dalam program destana tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data informasi yang dilakukan langsung di lapangan dengan menentukan hal penting yang nantinya berguna bagi penelitian. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi fakta secara langsung dalam masa observasi, peneliti harus memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang disampaikan informan, meminta informasi yang semenarik mungkin.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data informasi yang sangat actual karena bersumber langsung dari lapangan tempat penelitian Wawancara yaitu salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan narasumber, wawancara dilakukan setelah observasi. Pada saat wawancara akan digunakan wawancara semi terstruktur dimana pewawancara akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Pada saat wawancara Peneliti lebih fleksibel atau mengalir terhadap informan. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, tujuannya agar mendapat hasil yang maksimal dari informan. (Hanyfah et al., 2022). Saat melakukan wawancara peneliti menggunakan alat perekam hal itu di maksud supaya memudahkan dalam pemaparan data.

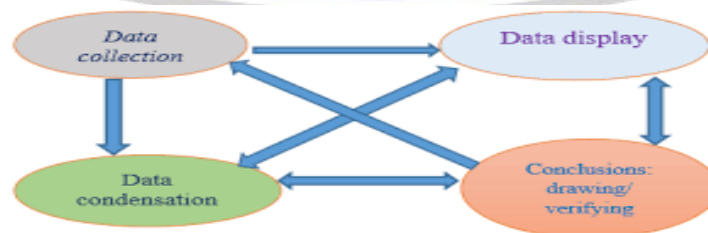
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai peneliti untuk memperoleh informasi yang berbentuk, dokumen, tulisan angka dan gambar yang digunakan dalam mendukung penelitian. Dalam makalah penelitian ini, Dokumentasi berupa foto dan teks diambil untuk memperkuat temuan penelitian dalam bentuk gambar.

5. Metode analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman .Berikut teknik analisis data model Miles dan Huberman.

Gambar 1. 1 Metode Analisis Data Model Miles dan Huberman



Sumber : Sugiyono, 2015

Analisis Data Kualitatif Model Interaktif menurut : Sugiyono, 2015

a. Data Collection

Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, pengamatan , wawancara selanjutnya peneliti menyesuaikan pada masalah yang dibahas pada penelitian yang akan memberikan dukungan mengenai penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Data Condensation

Pengumpulan Data Setelah data terkumpul sesuai dengan permasalahan penelitian, dilakukan pemilahan sesuai fokus penelitian guna mendapatkan hasil yang diharapkan dari penelitian.

c. Data Display

Data disusun dan ditafsirkan secara mendalam (deskriptif) sesuai dengan konsep dan tujuan operasional untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi.

d. Conclusion Drawing atau Verification

Meninjau hasil data lapangan. kemudian menarik kesimpulan dengan cara menelaah data yang diperoleh dan menggali data yang benar, sehingga diperoleh data yang valid, kemudian diambil kesimpulan dari hasilnya..

6. Keabsahan Data

Keabsahan data Agar data hasil penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan datanya. Ada uji keabsahan data yang bisa dilakukan.

a. Kredibilitas

Atau memeriksa keaslian data penelitian yang disampaikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keraguan sebagai suatu karya ilmiah. Untuk menguji kehandalan para peneliti , mereka akan melihat referensi dan ketelitiannya dengan membaca berbagai buku, makalah, hasil penelitian sebelumnya.

b. Transferability

Transferabilitas adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat nilai atau keterterapan hasil penelitian terhadap populasi di suatu lokasi. Bagi peneliti, nilai yang disampaikan sangat bergantung pada konsumen, sehingga ketika penelitian diperlukan dalam konteks dan situasi sosial yang berbeda, nilai yang disampaikan tetap dapat ditunjukkan.

c. Dependability Reliabilitas

Reliabilitas atau reliabilitas adalah suatu pengujian jika 75 pengujian yang dilakukan oleh orang lain dengan metode pengujian yang sama akan memperoleh hasil yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji seluruh metode penelitian. Semua aktivitas yang dilakukan oleh auditor sebagai bagian dari audit dipantau oleh auditor independen atau pengawas independen.

d. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga pengujian eksploratif. Penelitian dapat dikatakan obyektif apabila hasilnya dapat dipercaya atau diakui di kalangan luas. Penelitian kualitatif uji confirmability merupakan pengujian dari sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh sebuah peneliti